

Analisis Pembangunan Kayutangan Heritage Dari Formulasi Sampai dengan Evaluasi Kebijakan, Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Malang

Analysis of the Kayutangan Heritage Development form Formulation to Policy Evaluation, as well as it`s Impact on the People of Malang City

Oleh :

Retno Wulan Sekarsari ^{1)**}, Langgeng Rachmatullah Putra ²⁾

^{1) 2)}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Email: sekarsari@unisma.ac.id**

Abstract

This research is aimed at finding out and analyzing the optimization of the implementation of the Kayutangan Heritage Policy in Malang City. The identification of problems in this research is related to perception, trust, support, impact on the implementation of the Kayutangan Heritage Policy in Malang City. This research uses the theoretical basis of Public Policy which includes: policy formulation, policy implementation, and policy evaluation and policy communication. Apart from that, this research also uses several supporting theories such as communication theory and development theory which are used in this research. This research uses a mixed research method (max method) which focuses on analyzing and evaluating the implementation of the Kayutangan Heritage policy in Malang City. The results of this research show the category of perception of the people of Malang City, regarding the construction of Kayutangan Heritage which received category A Very Good (49.35 points), in addition to the form of community support for the construction of Kayutangan Heritage amounting to (62 points) and the impact resulting from the construction of Kayutangan Heritage, In the social media analysis, the impact was positive (52%), negative (15%) and neutral (33%).

Keywords: *Optimization, Public Policy, and Public Perception..*

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui serta menganalisa tentang optimalisasi diterapkannya Kebijakan Kayutangan Heritage di Kota Malang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi, kepercayaan, dukungan, dampak atas diterapkannya Kebijakan Kayutangan Heritage di Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori Kebijakan Publik yang didalamnya memuat : formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan serta komunikasi kebijakan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan beberapa teori pendukung seperti teori komunikasi dan teori pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (max metode) yang berfokus untuk menganalisis, dan mengevaluasi diterapkannya kebijakan Kayutangan Heritage Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan kategori persepsi masyarakat Kota Malang, terhadap pembangunan Kayutangan Heritage yang mendapatkan kategori A Sangat Baik (49,35 poin), selain itu bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan Heritage sebesar (62 poin) serta dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Kayutangan Heritage, yang terdapat didalam analisis media sosial, dampak positif sebesar (52%), negatif (15%) dan netral (33%).

Kata Kunci: Optimalisasi, Kebijakan Publik, dan Persepsi Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dalam usaha perencanaan pembangunan ditingkat daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Beberapa tahun terakhir, perkotaan senantiasa menjadi salah satu daya tarik untuk memicu terjadinya urbanisasi masyarakat, hal ini dilandasi dengan adanya daya tarik untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan berbagai kemudahan di kota termasuk lapangan pekerjaan. Kondisi yang demikian, mendorong penggunaan lahan yang cukup tinggi termasuk penguasaan lahan oleh sekelompok penduduk secara ilegal. Dengan pesatnya perkembangan tersebut, banyak sebagian dari lahan-lahan berkembang menjadi huniansementara yang cukup kumuh dan seringkali bukan sebagaimana arahan RT/RW yang ada di Kota tersebut.

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan, kualitas lingkungan permukiman yaitu melalui peningkatan kualitas pemukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Melalui diterapkannya Perpres tersebut, menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh di tahun 2019, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi untuk melakukan pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU ini mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama untuk melakukan penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni.

Melalui program KOTAKU ini, pemerintah Kota Malang juga berusaha memperbaiki tata kelola kotanya kearah yang lebih baik. Kondisi tata kelola Kota Malang, tidak sepenuhnya sudah berjalan dengan baik dan tertata, namun sebagian juga terdapat beberapa daerah yang memiliki wilayah lingkungan kumuh di Kota Malang. Hal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Malang, Nomor 86 Tahun 2015 yang didalamnya terdapat data 29 kelurahan kumuh dan salah satunya Kelurahan Kauman. Dari segi Historis Kelurahan Kauman, merupakan salah satu kawasan peninggalan

Kolonial Hindia Belanda. Hal ini bisadilihat dari berbagai macam peninggalan arsitektur dan tatanan lingkungan yang layaknya masa kolonial. Dengan potensi warisan historis yang dimiliki maka perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan tata kelola kota yang sesuai dengan potensi daerah setempat.

Dalam menjawab hal tersebut, tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan kumuh dikawasan Kayutangan Heritage di Kelurahan Kauman. Hal ini dilandaskan dengan diterapkannya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Buah dari penataan tersebut, sejak tanggal 22 April, 2018. Kawasan Kayutangan Heritage ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai kawasan warisan budaya (Heritage) yang semakin dikenal oleh masyarakat. Sejak adanya hal tersebut, membawa angin segar untuk menjadikan kawasan Kayutangan Heritage sebagai daerah wisata. Tepatnya pada bulan Mei 2022 Pemkot Malang mulai melakukan pembangunan di Kawasan Kayutangan Heritage. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat, yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pada salah satu poin dari 6 konsep utama yang akan diwujudkan dalam langkah sebagai berikut :

- a. Penegakan Regulasi Cagar Budaya
- b. Pengembangan Destinasi dan

- c. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Penguatan Peran Perguruan Tinggi, komunitas media dan pelaku bisnis
- e. Penguatan edukasi sejarah dan budaya disetiap jenjang pendidikan

Namun, disamping tujuan yang ingin dicapai pemerintah, implementasi pembangunan Kayutangan Heritage ini dinilai telah menyalah gunakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang kurang mencerminkan keadilan.

Mulai dari biaya pembangunan kawasan Kayutangan yang menelan anggaran yang cukup besar, Dua puluh tiga milliar anggaran yang diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang yang sebelumnya akan dialokasikan untuk program KOTAKU dengan target pembangunan pemukiman kumuh tidak disesuaikan sebagaimana rencana yang ada. Anggaran tersebut dianggap telah disalah gunakan dengan melakukan pembangunan di wilayah Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. Oleh sebab itu, adanya kebijakan pembangunan Kayutangan Heritage yang tidak sesuai ekspektasipublik, banyak menuai kontroversi di media sosial.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Carl J. Frederic dalam Agustino (2008) yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang didalamnya terdapat

hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu..

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan menetapkan suatu kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi.
2. Penetapan alternatif-alternatif.
3. Penerapan sarana keputusan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan.

2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan ataupun kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Wahab (2004:3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Evaluasi tahap perencanaan
- b) Evaluasi tahap pelaksanaan
- c) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

2.1.2 Komunikasi Kebijakan Publik

Kebijakan ialah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok serta instansi- instansi lainnya. Sedangkan

komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada

orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. (LAN RI: 2021).

2.1.3 Strategi Komunikasi dalam Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Publik

Menurut (LAN RI: 2021) Keberhasilan kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi teknokrasi tetapi juga dari aspek komunikasinya. Banyak pemangku kebijakan yang lebih fokus pada substansi kebijakan mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan namun melupakan aspek komunikasinya. Harus digaris bawahi, sebaik apapun kebijakan jika tidak diikuti oleh komunikasi yang baik pasti akan membawamasalah. Ada 5 (lima) hal yang menggambarkan kondisi hubungan komunikasi pemerintah dan masyarakat, yaitu sebagaiberikut:

- 1) Publik yang terfragmentasi
- 2) Pemerintah masih mengandalkan komunikasi satu arah
- 3) Kurang memanfaatkan komunikasi digital
- 4) Pemerintah kurang mampu meningkatkan partisipasi publik
- 5) Kurangnya koordinasi antara pemerintah/lembaga pemerintah dan para stakeholders.

2.1.4 Peran Media Sosial dalam Kebijakan Publik

Kaplan & Haenlein (Soetjipto, 2013) mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Menurut Rulli Nasrullah (Rasyidah, 2017) media sosial merupakan suatu medium internet yang digunakan oleh beberapa pengguna media sosial untuk mempresentasikan dirinya dalam berinteraksi dengan pengguna lainnya, berbagi informasi tentang aktivitas sehari-hari membentuk ikatan sosial secara virtual.

Menurut Tenia (Suyati, 2021) terdapat beberapa fungsi media sosial, diantaranya:

1. Mencari berita, informasi dan pengetahuan
2. Mendapatkan hiburan
3. Komunikasi Online
4. Menggerakkan masyarakat
5. Sarana berbagi

2.2 Komunikasi

Secara bahasa komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin yaitu “communis” yang artinya “sama” dan “communication” yang diartikan “membuat sama” berdasarkan bahasa komunikasi memiliki makna membawa kesamaan atau sepemikiran pada suatu pesan yang bisa dianut secara bersama. Secara luas komunikasi dapat diartikan sebagai “berbagi pengalaman”.

Secara konseptualisasi komunikasi

dibedakan menjadi 3 konsep, seperti yang dikemukakan oleh John R. Wenburg dan William W, Wilmoth:

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah
2. Komunikasi sebagai interaksi
3. Komunikasi sebagai transaksi

2.2.1 Prinsip Komunikasi yang Efektif

Komunikasi merupakan proses penting dalam menjalin hubungan antara komunikator dan penerima pesan. Dalam proses komunikasi terdapat berbagai simbol- simbol yang terbangun secara verbal dan non- verbal yang akan dimaknai oleh penerima pesan, sehingga dalam proses ini penerima pesan akan melakukan penafsiran pada simbol- simbol yang disampaikan oleh komunikator. Dalam proses komunikasi efektifitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sangat diperlukan. Dalam hal ini ada beberapa yang menjadi prinsip agar komunikasi terjadi secara efektif:

- a. Respek
- b. Empati
- c. Dapat didengar
- d. Rendah Hati

2.3 Perencanaan Pembangunan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses penentuan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan sumber daya yang tersedia. Bintoro dalam Idris mengemukakan beberapa unsur perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan atau strategi dasar rencana pembangunan
2. Adanya kerangka rencana atau

3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan
4. Kerangka Kebijakan yang konsisten.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan campuran (mix method) akan digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan kombinasi dari dua metode kuantitatif dan kualitatif. Menggunakan metode campuran bukan berarti menggunakan kedua metode sekaligus, namun disesuaikan tergantung kebutuhan dari proses kajian yang sedang dilakukan, termasuk karakteristik data di lapangan. Penggunaan metode campuran dalam penelitian yang dilakukan diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini untuk melihat kondisi yang ada di daerah tersebut. Dalam penelitian ini desain mix method yang akan digunakan adalah desain eksplanatoris, tim peneliti akan menggunakan metode kuantitatif pada tahap awal untuk menggali data dan melakukan analisa data setelahnya akan dilanjutkan menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran dan penjelasan-penjelasan terkait..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kayutangan Heritage

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusul dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan

pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan disini merupakan suatu proses perancangan menuju arah yang lebih baik.

Pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang yang dilandaskan setelah, pemkot menerapkan konsep KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dilakukan guna mencapai perubahan tata kelola yang baik, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kayutangan Heritage Mulai dibangun Pemkot Malang, pada Bulan Mei 2022. Yang dalam hal ini pemkot melakukan pembangunan dalam III Zona. Pembangunan Zona I meliputi persimpangan Rajabali sampai dengan persimpangan PLN, Sedangkan Zona II meliputi persimpangan Rajabali sampai persimpangan merdeka. Sedangkan Zona III yang diprediksi selesai pada November 2022 bertujuan untuk memberikan beberapa perubahan pada penataan jalur industri, saluran sanitase dan pengaspalan (Kompas.com, 2022).

Kayutangan Heritage dari segi wilayah merupakan bagian dari Kelurahan Kauman. Dimana berdasarkan SK Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 termasuk kedalam 29 wilayah kumuh yang diakibatkan arus perpindahan penduduk yang terjadi. Selain itu potensi Kayutangan Heritage sangat mengarah kepada hal destinasi sejarah dan wisata. Yang dikarenakan wilayah ini dulunya juga merupakan bekas kolonialisme Hindia Belanda. Serta wilayah ini pernah menjadi pusat Kota Malang pada tahun 1914.

Pembangunan Kayutangan Heritage menjadi daerah wisata dan pelestarian sejarah, tentu menjadi warna baru bagi Pemkot Malang dalam mengembangkan daerahnya terutama disektor perekonomian masyarakat. Dalam usaha pembangunan guna meningkatkan perekonomian publik, perlu untuk mengetahui tingkat strategis dari konsep yang ditawarkan. Oleh karena itu peran akademisi sangat dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi pasca diterapkannya kebijakan pembangunan Kayutangan Heritage.

Oleh karena itu perlu keterbukaan informasi kepada publik atas kebijakan pembangunan yang dilakukan. Dalam hal ini dilandaskan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dari Pemerintah Kepada Masyarakat. Dengan diterapkannya langkah pembangunan dan keterbukaan informasi publik, maka akan terbentuk suatu konsep kepercayaan, dukunga serta partisipasi publik dalam usaha mensukseskan pembangunan Kayutangan Heritage di Kota Malang.

4.1.1. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Potensi Pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang

Setelah diterapkannya konsep otonomi daerah di Indonesia. Yang dilandaskan pada Peraturan Perundangan Nomor 32 Tahun 2004. Yang mana pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing.

Salah satu usaha yang paling umum dilakukan pemerintah daerah dibidang pembangunan, khususnya infrastruktur.

Setelah dilakukanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, tentunya akan membawa dan menimbulkan stigma baru dimasyarakat yang khususnya berkaitan dengan kepercayaan publik. Kepercayaan publik muncul buah dari Akuntabilitas negara kepada rakyat atas program yang telah dilaksanakan.

Dalam mekanisme pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang, kepercayaan publik merupakan salah satu hal yang harus dibangun pemerintah sebagai pelaksana sistem pemerintahan. Dengan adanya tingkat kepercayaan publik juga menjadi bukti dukungan masyarakat kepada pembangunan yang dilakukan. Dalam proses pembangunan daerah masyarakat berperan sebagai pelaksana dari pembangunan yang terjadi. Yang mana jikalau terjadi kesamaan visi dan misi antara pemerintah dan masyarakatatas pembangunan yang dilakukan maka, proses tercapainya pembangunan akan lebih terarah dan fleksibel.

Gambar 1. : Kepercayaan Masyarakat Kota Malang, dalam Pembangunan Kayutangan Heritage

Tabel Persepsi Kepercayaan Masyarakat terhadap Kebijakan Pembangunan Kayutangan Heritage

Indikator	Indeks Persepsi		Nilai Persepsi		
	Mean	Jumlah Nilai Rata- Rata	Angka	Huruf	Kategori
1	2.23				
2	2.00				
3	1.90				
4	1.90				
5	1.90	1.974	40.351	A	Sangat Baik
6	1.67				
7	1.67				
8	2.23				
9	2.27				

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Sumber :Analisis Peneliti 2023

Pada tabel diatas kepercayaan masyarakat terkait pembangunan Kayutangan Heritage, yang tertuang di sembilan unsur pertanyaan peneliti kepada responden, terdapat berbagai jawaban dari responden, dari sembilan unsur tersebut ditarik suatu rata-rata jawaban yang memunculkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan Heritage. Dari hasil tingkat kepercayaan masyarakat atas pembangunan Kayutangan Heritage didapati hasil dengan kategori A (49,35 poin) yang memiliki arti sangat baik. Dalam hal ini dapat diartikan responden memiliki kepercayaan yang terhadap pembangunan Kayutangan Heritage.

4.1.2. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Negara Indonesia sudah menerapkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance. Dalam usaha penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance terdapat tiga pilar, stackholder yang menjadi landasan penerapannya, tiga pilar tersebut meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (dilansir dari perpustakaan.kasn.go.id)

Berdasarkan pernyataan diatas masyarakat atau rakyat menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan tata kelola yang baik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana program harus senantiasa

membangun dukungan dan partisipasi masyarakat atas upaya yang dilakukan, terutama dalam hal pembangunan.

Ketika dukungan mengarah kepada hal yang positif maka persetujuan masyarakat atas pembangunan yang dilakukan akan semakin kuat, namun sebaliknya ketika dukungan mengarah pada hal negatif, maka pembangunan yang sedang dilakukan mengalami penolakan.

Oleh karena itu dukungan dan partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal pembangunan Kayutangan Heritage menjadi penanda respon publik kepada pemerintah atas tindakan yang dilakukan.

Gambar.2 : Dukungan masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan Heritage

Tabel : Persepsi Dukungan dan Partisipasi Warga terhadap Kebijakan Pembangunan Kayutangan Heritage

Indikator	Indeks Persepsi		Nilai Persepsi		
	Mean	Jumlah Nilai rata-rata	Angka	Huruf	Kategori
10	2,06				
11	2,87				
12	2,66	2,48	62	A	Sangat baik
13	2,73				
18	2,06				

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Analisis Peneliti 2023

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat dukungan terkait dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kayutangan Heritage, pada tabel diatas yang mendapatkan nilai persepsi A yang diartikan dengan predikat sangat baik yang artinya masyarakat percayadan siap berpartisipasi dalam pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang.

4.1.3. Dampak Pembangunan Kayutangan Heritage Terhadap Lingkungan

Setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta tentu memberikan efek perubahan lingkungan yang sangat signifikan. Oleh

karena itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup, pasal 3 ayat 2 yang isinya, jenis usaha atau kegiatan wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup yang diterapkan oleh menteri. Hal ini dimaksudkan guna menjaga stabilitas lingkungan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, dampak yang dirasakan, bisa dirasakan secara langsung, ataupun harus menunggu beberapa waktu untuk merasakan dampak dari proses pembangunan yang sedang dilakukan.

Pada umumnya setiap instansi atau pihak yang bersangkutan juga mengharapkan dampak positif atas pembangunan yang dilakukan. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh waktu terlaksananya pembangunan yang dilakukan. Dalam konteks pembangunan Kayutangan Heritage, Pemkot Malang juga berusaha membangun dampak positif dalam kehidupan masyarakat lokal ataupun luardaerah Kota Malang.

Gambar. 3: Persepsi masyarakat terhadap pembangunan Kayutangan Heritage

Tabel : Persepsi Warga terhadap Dampak Kebijakan Pembangunan Kayutangan

Indikator	Indeks Persepsi		Nilai Persepsi		
	Mean	Jumlah Nilai rata-rata	Angka	Huruf	Kategori
14	2,76	2,66	66,66	B	Baik
15	2,3				
16	2,53				
17	3,06				

Sumber : Analisis Peneliti Tahun 2023

Pada proses pembangunan kayutangan heritage persepsi terkait dampak

pembangunan mendapatkan capaian baik. Capaian yang didapatkan tidak terlepas dari beberapa aspek yang dirasa memberikan dampak negatif dari proses pembangunan seperti halnya kemacetan yang muncul akibat dari pembangunan yang dilakukan, selain itu bisa berasal dari proses pembangunan yang ternyata memberikan daya tarik dari bagian luar kayutangan sehingga memberikan dampak kurang baik pada kayutangan heritage bagian dalam. Mengetahui persepsi dampak pembangunan akan membantu dalam melihat sejauh mana dampak yang dirasakan dari pembangunan yang sedang dilakukan, bila mendapatkan capaian baik, maka dampak yang dari pembangunan sudah mendapatkan atau menuju arah positif, hanya perlu memperhatikan beberapa aspek lainnya agar pembangunan dapat mengarah pada aspek lebih baik.

4.2. Sentimen Masyarakat Terhadap Pembangunan Kayutangan Heritage di Media Sosial

Perkembangan media sosial di dunia membantu manusia dalam hal penggalian informasi, pribadi, ataupun informasi publik secara efektif. Selain itu hal ini juga menyebabkan masyarakat mudah mengetahui dari seluruh prediksi dari kebijakan yang di implementasikan pemerintah kepada masyarakat khususnya pada penerapan Kebijakan Pembangunan Kayutangan Heritage di Kota Malang, yang dapat diakses dari berbagai lini seperti, Whatsapp, Twitter, Youtube, Instagram, dan lain sebagainya.

Selain itu dengan adanya media

sosial juga berfungsi sebagai salah satu media transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Hal ini juga didukung dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berfungsi sebagai salah satu kabar positif terbukanya informasi pemerintah kepada rakyat.

Dalam kajian kali ini, peneliti menggunakan data media sosial sebagai salah satu objek data untuk melihat pola komunikasi dan persepsi masyarakat atas pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang. Dalam pengumpulan datanya, dilakukan sejak 15 Mei-25 Juni 2022, dengan menggunakan alatmediatoolkit.com dan NodeXL. Media Node XL digunakan untuk mengetahui data masuk dari Twitter

Gambar 4 : Hasil Analisis Data masuk dari Twitter



Sumber : Analisis Peneliti 2023

Dalam hasil analisis data twitter kali ini

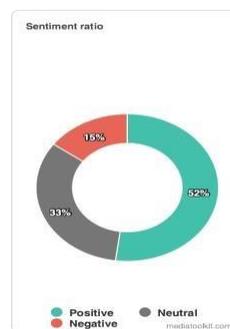
peneliti memanfaatkan bentuk media twitter yang seperti mini blog, yang memberikan kesempatan pada penggunanya untuk berpersepsi/ menggunakan tweet dengan jumlah yang tak terbatas. Dalam penarikan data kali ini didapatkan 167 jangkauan dalam tweeter terkait persepsi masyarakat atas pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang. Pada jangkauannya terdapat

berbagai prespektif, yaitu respon positif, negatif, dan desimentral atau netral.

Menurut Martono (2010:27) mengemukakan bahwa persepsi masyarakat merupakan suatu cara dalam memandangs suatu bentuk permasalahan dan sudut pandang tertentu dalam mengamati fenomena yang terjadi. Dari persepsi masyarakat inilah akan menghasilkan suatu penilaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam lingkungan yang bersangkutan.

Secara keseluruhan mengenai persepsi masyarakat atas pembangunan Kayutangan Heritage di Kota Malang menunjukkan respon yang positif yang dapat dipahami berdasarkan diagram lingkaran dibawah ini :

Gambar. 5 : Persepi Sentimen Masyarakat di Medsos Terkait Pembangunan Kayutangan Heritage



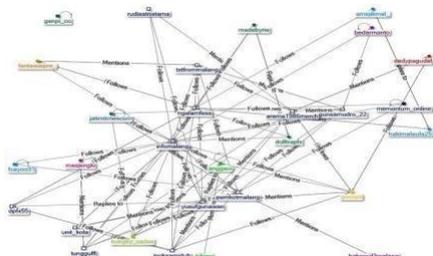
Sumber : Analisis Peneliti 2023

Berdasarkan data dari diagram lingkaran diatas, sebanyak 52% masyarakat memberikan respon positif terhadap pembangunan dan kebijakan terkait Kayutangan heritage, 33% memberikan respoin netral dan 15% meberikan respon negative. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembangunan

kayutangan heritage dianggap baik, walaupun masih terdapat beberapa persen atas ketidak sesuaian pembangunan yang dilakukan Pemerintah KotaMalang.

Menurut B.K. Lewis (2010) dalam bukunya *Media and Strategic Communication Attitudes and Perception Among Cellege Student* mengatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada suatu bidang teknologi digital, yang berpotensi membuat semua orang terhubung antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, mengenai persepsi masyarakat di media sosial yang saling terhubung digambarkan peneliti melalui hasil olah data menggunakan metode Node XL berikut :

Gambar. 6: Sentimen masyarakat di Media sosial



Sumber: Analisis Peneliti 2023

Berdasarkan hasil analisis jaringan menggambarkan keterkaitan antar akun-akun yang memberikan sentimen terhadap pembangunan Kayutangan Heritage. Keterkaitan dalam alur jaringan menunjukkan subjek-subjek yang memberikan respon positif dan negative sekaligus mengetahui sentimen tersebut dibangun secara positif atau negatif.

4.2.1. Komunikasi Pemerintah KotaMalang

Menurut Littlejohn & Foss (2018) Komunikasi merupakan suatu bentuk penyampaian, dan perpindahan informasi serta pemahaman antara dua pihak atau lebih dalam saluran komunikasi tertentu. Dalam proses pembangunan Kayutangan Heritage pembangunan komunikasi yang baik perlu dilakukan, antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pembangunan Kayutangan Heritage sebagian masyarakat sebagai perwujudan program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh), yang menandakan bentuk upaya pemerintah dalam memberantas kawasan kumuh di Kota Malang melalui Kayutangan Heritage

Gambar 7 : Hasil Analisis Data Presentase Pembangunan Kayutangan Heritage

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	8	26.7	26.7	26.7
Ya	22	73.3	73.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Analisis Peneliti 2023

Data ini menunjukkan presentasi komunikasi yang dibangun Pemerintah Kota Malang, dalam membina komunikasi publik sudah mengarah ke arah yang optimal. Hal ini dilengkapi dengan data perspsi positif masyarakat pada twiter yang sebesar 52 % positif.

4.3. Analisis Formulasi Pembangunan Kayutangan Heritage Kota Malang

Sebelum lahirnya suatu kebijakan, terdapat salah satu tahap dari diterapkannya kebijakan publik, yaitu tahap formulasi kebijakan. Tahap formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap teknis dalam penerapan kebijakan publik, yang biasanya

berisi alternatif penyelesaian masalah kebijakan.

Menurut Randel B. Ripley (1985), dalam proses formulasi kebijakan terdapat beberapa proses formulasi kebijakan, yang diantaranya, agenda setting, formulasi dan legitimasi tujuan & program, implementasi program, evaluasi program dan keputusan tentang masa depan kebijakan dan program.

Dalam agenda yang pertama yang merupakan agenda setting atau dikenal dengan proses `input` suatu case atas kebijakan yang diterapkannya. Makna kata input disini, biasanya berkaitan dengan sikap aktif dan partisipatif atas kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam kasus diterapkannya Kebijakan Kayutangan Heritage, tingkat keaktifan dan partisipasi masyarakat dapat digambarkan melalu tabel berikut :

Gambar 8: Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kayutangan Heritage

		Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent	
Valid	Tidak								
	Ya	12	40.0	40.0	100.0				
	Total	30	100.0	100.0					

Sumber : Analisis Peneliti 2023

Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kayutangan Heritage `masih kurang` halini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi dimasyarakat, terutama masyarakat sekitar wilayah tersebut.

Dalam usaha peningkatan partisipasi

masyarakat atas pembangunan Kayutangan Heritage, salah satulangkah yang bisa ditempuh adalah melakukan `sosialisasi` dengan menegaskan perwujudan *The Future Of Malang* dalam pembangunan Kayutangan Heritage sebagai pilot project peningkatan perekonomian masyarakat.

4.4. Pengembangan Kayutangan Heritage melalui PEST Analysis Model

Menurut Mahadiansar dan Asparyana (2020) model analisis PEST merupakan model analisis terhadap kekuatan eksternal organisasi ataupun diluar sebuah program yang mempengaruhi dari hasil yang di inginkan, yang didalamnya meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.

Dalam pembangunan Kayutangan Heritage, secara lebih rinci jikalau kita menggunakan analisis PEST sebagai berikut :

- a) Political Situations, merupakan faktor politik atas pembangunan Kayutangan Heritage. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dan mendukung pembangunan kayutangan heritage :
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

b) Economic Situation, disini berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat setelah pembangunan Kayutangan Heritage diterapkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, rata-rata masyarakat yang berkunjung dikawasan Kayutangan Heritage, masih berfokus di sebantaran jalan tanpa masuk kedalam kampung wisata. Yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi antara masyarakat didalam lokasi wisata dan luar lokasi, yang wisata Kayutangan Heritage Kota Malang.

c) Sosicial Situations, atau situasi sosial masyarakat dalam pembangunan Kayutangan Heritage, memilikipotensi yang sangat strategis dan besar. Berdasarkan hasil analisis peneliti, sekitar 83 % dari seluruh populasi penduduk adalah usia produktif, yang hal ini menjadi bekal pemerintah untuk memajukan kawasan Kayutangan Heritage.

d) Technolgy Situations, dalam pembangunan Kayutangan Heritage, dapat diklasifikasikan dalam dua hal berikut :

- Hard Technology, merupakan struktur perlengkapan fisik yang mendukung pelayanan publik. Dalam pembangunan Kayutangan Heritage ditinjau dari hal tersebut, yang didasarkan observasi peneliti, masih kurangnya sarana toilet umum, tempat sampah. Selain itu di bidang prasarana, perbaikan tata letak parkir perlu diwujudkan,

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
dengan mencanangkan sistem E-Parking yang terpusat, sehingga dapat memperbaiki tata kelola pembangunan Kayutangan Heritage.

- Soft Technology, dalam konteks ketrampilan stackholder yang berada di ruang lingkup Kayutangan Heritage, masih memerlukan dukungan dan peran pemerintah, misalnya pengadaan pelatihan management pelayanan, promosi, dan pemasaran produk yang dikhususkan kepada pelaku UMKM setempat.

4.5. Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Kayutangan Heritage

Dalam proses analisis kebijakan elite, menurut Thoha (2008), merumuskan beberapa model analisis kebijakan secara elite, dibagi berdasarkan tiga tingkatan yang pertama elite politic, sebagai pengarahaan dan penetapan kebijakan, pejabat atau administrator sebagai pelaksana kebijakan, dan masa atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Pada kasus pembangunan Kayutangan Heritage, mengimplementasikan kebijakan Top-Down. Hal ini dilandaskan dari proses lahirnya kebijakan yang langsung dari pemerintah elite dan diusung oleh elite politic sehingga bersifat secara sentralistik atau terpusat.

4.5.1. Evaluasi Kebijakan Kayutangan Heritage

Dalam proses penerapan kebijakan publik, evaluasi kebijakan merupakan faktor akhir setelah implementasi kebijakan. Dalam hal Kebijakan Pembangunan Kayutangan Heritage, dilandaskan dengan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan William Dunn

- Efektivitas kebijakan, merupakan faktor yang menjadi acuan tercapainya kebijakan publik. Dalam pembangunan Kayutangan Heritage, berdasarkan observasi peneliti, untuk mencapai tujuannya, masih terdapat beberapa ketimpangan dibidang perekonomian, yang kalah bersaing antara UMKM lokal dan café-café yang berdiri disepinggir jalan Kayutangan Heritage, sehingga memicu timbulnya ketimpangan perekonomian dimasyarakat.
- Efisiensi dan kecukupan kebijakan. Merupakan faktor pemanfaatan sumberdaya secara tepat guna mencapai hasil yang optimal. Dalam pembangunan Kayutangan Heritage, penerapan efisiensi kurang diperhatikan, terutama dalam usaha peningkatan kualitas SDM lokal. Hal ini bisa dilakukan dengan pengadaan Workshop atau pelatihan yang dapat meningkatkan soft skill publik.
- Perataan dampak Kebijakan, dalam case pembangunan Kayutangan Heritage masih terdapat ketimpangan dampak atas pembangunan Kayutangan Heritage. Ketimpangan ini terjadi antara pedagang UMKM yang berada didalam kampung yang cenderung sepi pengunjung, dibandingkan

Kayutangan Heritage (Observasi peneliti 2023)

- Responsivitas Kebijakan, hal ini berkaitan dengan sikap dan respon pemerintah mengenai alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam Pembangunan Kayutangan Heritage sudah lumayan baik, namun harus dimaksimalkan, terutama dalam mengatasi ketimpangan perekonomian yang terjadi, serta peningkatan pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Ketepatan Kebijakan, pembangunan Kayutangan Heritage, merupakan salah satu langkah yang tepat serta potensial yang dibangun pemkot Malang, karena ditinjau dari segi historical wilayah ini merupakan peninggalan Hindia Belanda, dan Bekas Alun-alun Kota Malang 1974, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan disektor destinasi wisata, edukasi dan pelestarian sejarah di Kota Malang

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakandiatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembangunan Kayutangan Heritage masih perlu diperbaiki, dengan melibatkan seluruh stackholder yang potensial mendukung peningkatan kualitas Kayutangan Heritage

5. PENUTUP

Kesimpulan

Pembangunan Kayutanga Heritage merupakan salah satu agenda perwujudan The Future Of Malang. Dalam usaha pembangunan

Kayutangan Heritage mendapatkan indeks persepsi masyarakat dalam kategori `sangat baik` dengan indikator kepercayaan masyarakat (49,35 poin), dukungan dan partisipasi sebesar (62 poin). Sedangkan dalam hal lain, khususnya terkait dampak Pembangunan Kayutangan menunjukkan prediksi `Baik` dengan skor (66,66).

Dalam pembangunan Kayutangan Heritage juga, terdapat sentimen masyarakat yang berfungsi sebagai tanda respon publik kepada masyarakat. Dalam hal sentimen masyarakat cenderung mengarah ke respon positif (52%), respon negatif (15%) dan sisanya netral (33%). Dalam hal model komunikasi publik di Kota Malang menggunakan model linier yang diterapkan secara efektif, meskipun informasi yang disampaikan masih bersifat minoritas. Selain itu dalam pembangunan Kayutangan Heritage sudah melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya, walaupun partisipasi yang dilakukan masih cenderung minim

Saran

Untuk membenahi kekurangan atas didirikannya Kayutangan Heritage, Pemerintah Kota Malang harus peningkatan sosialisasi melalui media sosial, kedua membina kerjasama dengan tokoh masyarakat dan kelurahan dalam hal keamanan. Ketiga membentuk “Juru Bicara” dan “Pemandu wisata” yang berfungsi memperkenalkan setiap sudut dan potensi Kayutangan Heritage Kota Malang

Keempat menerapkan konsep parkir yang melibatkan masyarakat dan kelurahan guna meningkatkan

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
perekonomian atau dengan sistem pengelolaan parkir yang tersentral.

Kelima, meningkatkan Responsivitas pemerintah dalam usaha penentuan alternatif penyelesaian masalah, seperti masalah ketimpangan pedagang lokal dan café-café didepan jalan Kayutangan Heritage dengan kebijakan publik yang efisien dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William, N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction New Jersey:Pearsons Education*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno,
- Ndrah, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembangunan.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Alamsyah,
- Arni Muhammad. (2008). *Komunikasi Organisasi*. (h.7). Jakarta: Bumi Aksara.
- Brogan, C. (2010). *Social Media 101 :Tactic and Tips to Develop Your Business* Mustari,
- Nuryanti. (2012). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Mustofa, M.Lutfi. (2012). *Monitoring dan Evaluasi; Konsep dan Penerapannya bagi Pembinaan Kemahasiswaan*. Malang: UINMaliki Press.
- Petunjuk Teknis Monitoring Isu dan Manajemen Krisis.
- Kamal. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.



fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id

ejournalwiraraja.com

Patarai, Muhammad Idris. 2016
Perencanaan Pembangunan Daerah
(Sebuah Pengantar).Makasar: De La
Macca.

Susanto, Eko Harry. (2018). Komunikasi
Manusia: Teori dan Praktik dalam
Penyampaian Gagasan. Jakarta:
Penerbit Mitra Wacana Media.

Mulyani, Lalu.,dkk. (2019). Potensi
Kampung Heritage Kayutangan:
sebagaiDestinasi Wisata di Kota
Malang.Malang: Deazha.

Rogers, E. M., & Dearing, J. W., Agenda-
Setting Research: Where has it been?
Where is it going?!, *Communication
Yearbook*, 11,1988, p. 555-594).

Ridhoi Ronal, dkk. 2021. Kawasan
Kayutangan Malang dalam Lintas
Sejarah . Malang: Universitas Negeri
Malang

Vol 18, nomor 2, Desember 2023

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X